



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
JL. KYAI SINGKIL NO. 42/TELP.FAX (0291) 685745
DEMAK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Jateng Telp. Fax (0291) 685745 Kode Pos 59
<http://www.dinsosp2pa.demakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@gmail.com

Demak, 24 Agustus 2023

Nomor : 460 / 679
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Verifikasi
Rancangan Akhir Renja
Tahun 2024

Kepada :
Yth. Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Demak
di –
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan Verifikasi Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19631110 198912 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinsos, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. RENJA-SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Visi, Misi Kepala Daerah ke dalam Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. RENJA merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA – PAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
- c. RENJA-SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD sebagai wujud dari kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada Tahun 2024.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak maka Rencana Kerja Dinas Sosial, P2PA Tahun 2024 dituntut untuk mampu menjawab persoalan dan isu strategis terkait dengan permasalahan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021-2026. Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026;
2. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026.

Perencanaan dan Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menterjemahkan visi, misi yang telah ditetapkan menjadi suatu rencana kerja yang nyata dan terukur. Dalam tatanan operasional, rencana kerja dan anggaran merupakan acuan kerja sekaligus menjadi alat pengendalian dan evaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Demak.

Rencana Kerja ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2024, disusun sebagai dokumen Perencanaan tahunan (1 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 37. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 39. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
 40. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
 41. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Rencana Kerja dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun berjalan.

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ini dimaksud untuk :

- a. Menjabarkan rencana strategis Dinsos, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis

yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024.

- b. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024.
- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak selama 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dengan tujuan :

- a. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
- b. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
- c. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024.
- d. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2022)

Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Ranwal Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan PD, Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya serta tabel rancangan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana untuk tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL, P2PA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, P2PA Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, P2PA

Evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Sosial, P2PA tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial, P2PA Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di bidang sosial dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada Tahun 2022.

Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2022 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.935.134.797,- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar 97,75% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 25.286.624.311,- (97,50%).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 Terlihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut :

A. URUSAN SOSIAL

Kinerja program/kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai 97,75 %, yang berarti capaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya telah tercapai atau mendekati 100 %. Program dan kegiatan tersebut, antara lain :

Program 1 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-1, dari 8 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan terdiri 8 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya

tergambar bahwa secara umum capaian serapan anggaran 98,07%, sedangkan capaian kinerja berjalan dengan baik mencapai 100 %.

Program 2 : Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program 2, dari 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian Serapan Anggaran pada Program 2 mencapai 99,50%.

Program 3 : Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program 3, dari 2 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan mempunyai 2 indikator kinerja, 22 indikator sub kegiatan, dan 2 indikator kinerja telah melebihi target, program dan kegiatan tersebut didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.201.278.700,-- dengan capaian anggaran 91,67%. Diantara 2 kegiatan tersebut capaian paling tinggi pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan capaian sebesar 96,75%, kegiatan tersebut juga masuk dalam urusan Standart Pelayanan Minimal sehingga capaian diharuskan 100%. Tergambar bahwa secara umum capaian indikator kegiatan dilaksanakan dengan baik.

Program 4 : Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program 4, dari 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan, 1 indikator kinerja, target, dan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-4, secara umum bahwa capaian kinerja indikator program melebihi target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program -4 ada 1 kegiatan, dan pada tahun 2022 untuk mendukung capaian indikator program - 4 tersebut, dilaksanakan 1 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan 1 indikator kinerja program. Capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mencapai 100% sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik dan melebihi target mencapai 100%.

Program 5 : Penanganan Bencana

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-5 dan 2 Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-5, ada 2 indikator kinerja yang dicapai sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, Persentase (%) korban bencana kab/ kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana melebihi target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung dengan adanya kegiatan penanganan pandemi covid 19, berupa Bantuan Santunan Kematian Protokol Kesehatan Covid 19, Pemberian Bantuan Kekerabatan Sosial kepada Kelompok masyarakat dan Pemberian Bantuan permukiman dan sandang kepada korban bencana alam dan sosial.

Namun begitu, bahwa program – 5 tersebut diatas dilaksanakan pada tahun 2022, dan berlanjut pada Tahun 2023. Capaian Program Penanganan Bencana mencapai 100% sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik dan melebihi target mencapai 100%.

Program 6 : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-6, 1 Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-6, ada 1 indikator kinerja yang dicapai sesuai dari target yang telah ditetapkan.

Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja Program yaitu Persentase taman makam pahlawan yang terawat dengan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan. Capaian serapan anggaran sebesar 100%.

B. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program 7 : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-7, 2 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-7, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran terlihat bahwa, Persentase (%) kelembagaan PUG dan PUHA aktif capaian kinerja mencapai 45%, hal ini didukung dengan anggaran Rp. 50.999.900 dengan serapan anggaran mencapai 99,24%.

Program 8 : Perlindungan Perempuan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-8, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-8, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran pada tahun 2021 terlihat bahwa, Persentase (%) perempuan dalam jabatan publik dari target 12,5% dan

realisasi capaian 53,15%. Dari hasil pengukuran ini menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, baik itu di lembaga pemerintahan yang menjabat sebagai eselon II, III, IV serta peran perempuan di lembaga yudikatif, legislatif maupun perempuan sebagai tenaga manager/ administrator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Program 9 : Peningkatan Kualitas Keluarga

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-9, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-9, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran pada tahun 2021 terlihat bahwa Persentase (%) kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dari target 36,5 dan realisasi capaian 37,83%. Dari hasil pengukuran tersebut menunjukan bahwa perempuan berkontribusi sebanyak 37,83% terhadap pendapatan keluarga. Hal tersebut didukung juga dengan adanya anggaran sebesar Rp. 117.906.000 dan realisasi serapan anggaran mencapai 99,35%.

Program 10 : Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-10,1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-10, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran pada tahun 2021 terlihat bahwa, Persentase (%) angka pernikahan usia dini (anak) dari target 278 dan realisasi 325. Maka hal tersebut menunjukan angka pernikahan usia dini (anak) masih tinggi di Kabupaten Demak. Adanya dukungan anggaran Rp. 120.000.000,00 dan serapan anggaran sebesar 99,26%.

Program 11 : Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-11, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-11, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran pada tahun 2021 terlihat bahwa, kasus kekerasan terhadap anak dari target 35 dan realisasi 39. Maka hal tersebut menunjukan kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi di Kabupaten Demak. Adanya dukungan anggaran Rp. 84.000.000,00 dan serapan anggaran sebesar 99,05%.

Program 12 : Perlindungan Khusus Anak

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-12, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, indikator kinerja, target, dan realisasinya Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Program-12, secara umum realisasi capaian kinerja indikator kinerja dicapai melebihi dari target yang telah ditetapkan. Mengacu pada hasil pengukuran pada tahun 2021 terlihat bahwa, kasus kekerasan terhadap anak dari target 17 dan realisasi 5. Maka hal tersebut menunjukkan masih adanya pelaku anak. Pada Program Perlindungan Khusus Anak didukung dengan adanya anggaran DAK, pagu anggaran Rp. 285.544.000,00 dan serapan anggaran sebesar 23,21%

NARASI evaluasi

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial, P2PA
dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, P2PA s/d Tahun 2022
Kabupaten Demak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntr a 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan	100	100	100	100	100	100	100
						Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	80,5	79,87	80,32	77,70	97	77,70	96,52
1	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RKA, DPA, RKA Perubahan, DPA Perubahan, LKJiP, LPPD, L K P J	10	10	10	10	100	10	100
1	0	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan (Dengan Satuan:Dok)	8	8	8	8	100	8	100
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen penganggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4	4	100	4	100
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	4	4	100	4	100
1	0	0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji & tunjangannya (Dengan Satuan:Orang)	36	36	36	36	100	36	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium Non- ASN pendukung pelaksanaan (Dengan Satuan:Orang)	29	25	29	25	100	29	83,33
1	0	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaiana perangkat daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat (Dengan Satuan:Orang)	85	85	85	85	100	85	100
1	0	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang- undangan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Kali)	20	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	7	7	7	7	100	7	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	12	12	12	12	100	12	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	12	10	10	100	10	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	100	12	25
1	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan Perundanng- undangan (Dengan Satuan:Jenis)	3	3	3	3	100	3	25
1	0	0	2	0	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat yang diikuti dan diselenggarakan (Dengan Satuan:Kali)	12	12	12	12	100	12	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata (Dengan Satuan:Arsip)	10	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi elektronik yang berfungsi (Dengan Satuan:Aplikasi)	1	-	1	1	100	1	20
1	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan (Dengan Satuan:Unit)	22	25	22	22	100	22	36,66
1	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	12	1	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	7	8	7	7	100	7	22
1	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	15	4	15	15	100	15	107
1	0	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	8	5	3	3	100	3	42,85
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa Penunjang urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang terkirim (Dengan Satuan:Item)	2	2	2	2	100	2	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Data Air dan Listrik yang terpenuhi (Dengan Satuan:Kali)	12	12	12	12	100	12	20
1	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	242	40	49	49	100	49	20,24

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Jabatan yang tereplihara (Dengan Satuan:unit)	1	1	1	1	100	1	100
1	0	0	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapan gan yang terelihara (Dengan Satuan:unit)	26	26	26	26	100	26	23,63
1	0	0	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/ Mesin yang terpelihara (Dengan Satuan:unit)	8	5	8	8	100	8	20
1	0	0	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung /Bangunan yang di rehabilitasi (Dengan Satuan:unit)	7	7	7	7	100	7	100
1	0	0	2		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	12	12	12	12	100	12	48
1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	69,48	95,67	34,84	34,84	100	34,84	50,14
1	0	0	2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam daerah yang minta ijin	51	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	38	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	290	50	50	74	148	74	25,51
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	250	50	50	60	120	60	24
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14	14	14	14	100	14	100
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75	26	15	36	240	36	48
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	75	10	15	25	100	25	33,33
1	0	0	2	0	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	14	14	100	14	93,33
1	0	0	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	06	04	2	01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	4491	1211	3229	3590	111	3590	79,93
1	06	04	2	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500	370	469	650	138	650	26
1	06	04	2	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	910	-	340	340	100	340	37,36
1	06	04	2	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	325	-	5	5	100	5	1,53
1	06	04	2	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120	-	65	65	100	65	54,16
1	06	04	2	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	900	350	120	360	300	360	40
1	06	04	2	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200	35	48	140	291	140	70

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	328	70	48	100	208	100	30,48
1	0	0	2	0	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	240	6	40	60	150	60	25
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	-	200	200	100	200	20
1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	7	48	48	100	48	20
1	0	0	2	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600	93	48	120	250	120	20
1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	162	30	24	24	100	24	14,81
1	0	0	2	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	2132	286	286	356	124	356	16,69
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	90	48	48	100	48	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2	0	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	240	-	48	48	100	48	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250	180	50	50	100	50	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	-	50	50	100	50	100
1	0	0	2	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	240	-	48	48	100	48	20
1	0	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	225	15	20	20	100	20	8,88
1	0	0	2	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	46	-	24	36	150	36	78,26
1	0	0	2	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	244	-	24	24	100	24	9,83

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	0	0	2	1	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	206	-	36	36	100	36	17,47
1	0	0	2	1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	268	-	48	48	100	48	17,91
1	0	0	2	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90	-	48	48	100	48	53,33
1	0	0	2	1	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	134	-	24	24	100	24	17,91
1	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	74,96	36,83	57,11	62	108	62	82,71
1	0	0	2		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang dilayani (Dengan Satuan:anak)	800	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	800	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data	266.203	266.203	266.203	266.203	100	266.203	100
1	0	0	2	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	826.608	546.993	826.608	826.608	100	826.608	100
1	0	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	311.842	161.110	311.842	311.842	100	311.842	100
1	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	161.110	1.913	8.500	9.973	117	9.973	6,19

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
						Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
1	0	0	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan s o s i a l	1000	280	100	100	100	100	10
1	0	0	2	0	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	180	200	200	100	200	20
1	0	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	0	200	200	100	200	20
1	0	0	2	0	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000	-	100	175	175	175	17,5
1	0	0	2	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500	100	100	200	200	200	40
1	0	0	2		Penyelenggara an Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	40	30	30	36	120	36	90

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
1	06	06	2,02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	30	30	36	120	36	90
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Terawat	100	100	100	100	100	100	100
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP	96	96	96	96	100	96	100
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	96	96	96	96	100	96	100
2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	80	45	45	50	111	50	62,5
2	08	02	2,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembagaan PUG	42	42	42	42	100	42	100
2	08	02	2,01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42	-	-	-	-	-	-
2	08	02	2,01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	-	-	-	-	-	-
2	08	02	2,01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	42	42	42	42	100	42	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
						Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	0	0	2	0	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	-	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	125	-	25	25	100	25	20
2	0	0	2	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	125	-	25	25	100	25	20
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100
2	0	0	2	0	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	1	1	1	1	100	1	100
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan	1	1	1	1	100	1	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	42	-	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi korban yang memerlukan rujukan	3	3	3	3	100	3	100
2	0	0	0	0	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	280	90	-	-	-	-	-
2	0	0	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100	3	100
2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:tahun)	48	-	-	-	-	-	-

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
2	0	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	75	-	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	75	-	-	-	-	-	-
2	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	100	50	50	50	100	50	50
2	0	0	2	0	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pelatihan peningkatan kualitas keluarga	10	2	2	2	100	2	20
2	0	0	2	0	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80	50	60	60	100	60	75
2	0	0	2	0	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240	-	60	60	100	60	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
2	0	5	0		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat yang menggunakan data gender dan anak (Dengan Satuan:%)	100	60	60	60	100	60	60
2	0	5	0	2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	250	50	50	50	100	50	20
2	0	5	0	2	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	250	50	50	50	100	50	20
2	0	5	0	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	200	50	-	-	-	-	-
2	0	8	0		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	70	50	50	50	100	50	71,42
2	0	8	0	2	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	42	42	42	42	100	42	100
2	0	8	0	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	210	42	42	42	100	42	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	2	2	2	100	2	20
2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak	100	25	25	22	88	22	22
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	48	25	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	1	1	1	1	100
2	0	0			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart	100	100	100	100	100	100	100
2	0	0	2	0	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	16	4	4	4	100	4	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
2	0	0	2	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42	-	-	-	-	-	-
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40	10	10	10	100	10	25
2	0	0	2	0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	3	3	3	100	3	100
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100	3	100
2	0	0	2	0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	45	5	5	5	100	5	11,11
2	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	50	10	10	10	100	10	20

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Kinerja Akhir Resntra 2021 – 2026 (Tahun 2026)	Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Renja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021 – 2026	
1					2	3	4	5	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
									6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4)
					Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota							
2	08	07	2,03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50	-	-	-	-	-	-
2	08	07	2,03		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kab/Kota	Peresentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
					Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	3	3	100	3	100

Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2022

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)*100	11=(9/7)*100	12
4	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN										
a	Percepatan penanganan covid 19 dan stunting	Prevalensi stunting	%	35,76 (SSGBI 2019)	25	22.500.000	16,2	21.450.000	100	95,33	
	Koordinasi aksi konvergensi dan perencanaan penurunan stunting	Jumlah KPM PKH yang memiliki anak stunting yang mengikuti FDS Gizi dan Kesehatan	Keluarga	-	25	22.500.000	25	21.450.000	100	95,33	1.6.5.2.02.2
9	PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL										
a	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru	Jumlah tenaga kerja baru yang dimagangkan dan atau disalurkan	orang	-	35	54.450.000	35	54.450.000	100	100	
	Pemagangan tenaga kerja disabilitas	Jumlah difabel yang dimagangkan	orang	-	15	27.000.000	15	27.000.000	100	100	1.6.4.2.01.8
	Penyaluran tenaga kerja disabilitas	Jumlah difabel yang disalurkan	orang	-	20	27.450.000	20	27.450.000	100	100	1.6.4.2.01.8
b	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia	Jumlah RTM/Difabel/Lansia yang mendapat bantuan sosial	orang	3.308	1.098	1.100.750.000	1.340	1.034.905.700	122	94,01	
	Pemberian bansos untuk RTM	Jumlah Warga Miskin dalam DTKS yang mendapat Santunan Kematian	Orang	1.211	262	394.500.000	340	393.000.000	129	99,61	1.6.5.2.02.2

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)*100	11=(9/7)*100	12
	Pemberian bansos untuk difabel	Jumlah difabel yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	1.597	248	308.000.000	362	260.015.700	145	84,42	1.6.4.2.01.3
	Pemberian bansos untuk lansia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	200	258	206.250.000	332	195.890.000	128	94,97	1.6.4.2.01.3
	Pemberian bansos untuk anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar (PM Panti) yang mendapat Bantuan Santuan Orang Satuan Harian (SOSH)	Anak	300	300	180.000.000	300	180.000.000	100	100	1.6.5.2.01.1
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan sandang di Rumpelsos	Anak	-	30	12.000.000	6	6.000.000	50	50	1.6.4.2.01.2
c	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - on line	Persentase desa yang menerapkan SLRT-online	%	100	100	592.000.000	100	496.010.200	134	83,78	
	Pemeliharaan aplikasi SLRT	Jumlah Data yang di Update oleh Operator Kabupaten	Data	546.993	-	-	-	-	-	-	1.6.5.2.02.1
	Verifikasi dan validasi data	Jumlah data yang diverifikasi dan validasi oleh operator SIKS NG Desa dan Kelurahan	Data	546.993	609.848	592.000.000	821.998	496.010.200	134	83,78	1.6.5.2.02.1

Pelaksanaan Program Prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam mendukung Program 4 yaitu Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan dan Program 9 yaitu Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, merupakan pekerjaan rutin atau kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain Pemberian Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial. Hal tersebut tidak terlepas adanya Potensi Sumber dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain TKSK, Peksos, Pendamping Sosial PKH serta koordinasi dan komunikasi yang terus dilakukan antara Dinas Sosial, P2PA dengan Pihak Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Progress Pelaksanaan Program Prioritas/ Program Unggulan Bupati Demak Tahun 2023 semester 1 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Ekstrem / P3KE tercapai 361.545 Jiwa (43,47%) dari jumlah ART 831.717 jiwa sedangkan KRT tercapai 122.822 KK (67,18%) dari jumlah KRT 182.826 KK. Kegiatan Santunan Kematian DTKS belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal perencanaan dikarenakan proses penetapan SK BNBA oleh Bupati Demak.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, P2PA

Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, P2PA merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, P2PA berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja SPM, IKK dan IKU yang telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2022 dikategorikan mengacu pada tabel dibawah (2.2), ditahun 2022 ada 5 indikator kinerja yang tertuang dalam standart pelayanan minimal (SPM) dan capaiannya sudah melebihi dari target. dan 44 Indikator kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari indikator dalam LPPD dan SDGs. Dari 44 indikator tersebut 10 indikator urusan sosial merupakan indikator program dalam RPJMD, dan capaian untuk tahun 2022 sudah melebihi target, dan 1 indikator yaitu AMP perempuan terhadap laki – laki di PT, tidak bisa terisi karena tidak memiliki data.

Capaian indikator baik SPM maupun IKK pada tahun 2021 seluruhnya melebihi target Sedangkan untuk tahun 2022 , baik SPM maupun IKK realisasi capaiannya melebihi target. Adapun capaian SPM tahun 2022 sebagai berikut :

- Anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti, sejumlah 898 anak dari target 898 anak realisasi 898 anak, capaian 100%.
- Lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti, sejumlah 883 Orang dari target 883 Orang realisasi 883 Orang, capaian 100%.
- Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti, sejumlah 1.755 Orang dari target 1.755 Orang realisasi 1.755 Orang, Capaian 100%.

- Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar, sejumlah 511 Orang dari target 511 Orang realisasi 511 Orang, Capaian 100%
- Korban bencana (alam/sosial) yang mendapatkan layanan Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana tercapai 100%.

Sedangkan capaian IKK untuk tahun 2022, antara lain : dari 44 indikator yang ada dapat dikelompokkan antara lain :

- 22 indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana 3 indikator diantaranya cakupan pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan, cakupan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan, APM perempuan terhadap laki – laki pada Perguruan tinggi datanya 0 tidak terdapat data. Dan 19 indikator yang lain tercapai sesuai target, hal ini didukung dengan data yang ada, karena tidak menjadi indikator program dalam RPJMD maupun Renstra.
- 11 indikator urusan sosial, dimana 11 indikator tersebut merupakan indikator pada Renstra , dan semuanya tercapai sesuai target.
- 11 indikator merupakan indikator dalam SDGs, yang tidak menjadi indikator dalam Renstra, namun karena indikator menjadi tupoksi Dinas Sosial, P2PA, sehingga target dan capaian bisa dilaksanakan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sejumlah 10 indikator seluruhnya telah tercapai melebihi target, capaian paling tinggi pada indikator Persentase PPKS yang mandiri mencapai 163,33% sedangkan capaian paling rendah pada indikator Persentase Penurunan PPKS mencapai 91,68%.

Terjadinya keberhasilan pencapaian target SPM, IKU maupun IKK tersebut diatas didukung antara lain :

- Perhatian pemerintah pusat terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)/PMKS khususnya masyarakat miskin yang diberikan bantuan berupa bantuan Sembako serta bantuan PKH. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat

memberikan Perluasan Sasaran bantuan Sembako dan PKH sehingga jumlah masyarakat miskin yang terdampak Covid 19 lebih banyak mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial. Kondisi ini juga membuat pergeseran anggaran pada OPD di Kabupaten Demak dialihkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, bantuan tersebut berupa Bantuan Makanan Bergizi (SOSH) bagi anak terlantar di LKSA dan Lanjut Usia Terlantar, Bantuan Santunan kematian DTKS, Bantuan Premi Asuransi Bagi Pekerja Rentan DTKS, Bantuan Usaha Bagi Penyandang Disabilitas, Perempuan Muda dan Rentan Ekonomi, Bantuan Kartu Jateng Sehat (KJS) dan Bantuan Sembako dari Pihak lain seperti Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat maupun BUMN.

Kementerian Sosial RI juga memberikan dukungan bantuan Stimulan bagi anak disabilitas, bantuan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas yang memiliki dasar usaha, bantuan alat dengar dan kursi roda bagi penyandang disabilitas fisik dan bantuan pendidikan bagi anak disabilitas.

Pencapaian target tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dengan adanya anggaran APBD untuk pelaksanaan kegiatan dalam menunjang keberhasilan tersebut. Salah satu kegiatan yang menunjang antara lain kegiatan pelatihan ketrampilan kepada PPKS.

Penggunaan sumber dana APBN yang disalurkan kepada KPM yang menerima Bantuan Sembako yang diberikan dalam bentuk kuota yang langsung ter *Top Up* pada masing – masing kartu KKS yang dimiliki KPM sebesar Rp. 200.000,00 selama 12 bulan. Di tahun 2022 jumlah KPM Bantuan Sembako sejumlah 162.174 KK dengan total anggaran Rp. 389.217.600,00. Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki sejumlah 168 pendamping PKH yang bertugas dalam mendampingi dan memonitoring KPM di 249 Desa/Kelurahan. Penggunaan Bantuan anggaran bagi 62.355 KPM PKH dengan total pencairan anggaran PKH sejumlah Rp. 321.320.175.000,00.

Penggunaan Sumber Dana APBD digunakan juga untuk masyarakat miskin yang didasari pada Data DTKS. Pemberian

bantuan makanan bergizi bagi 350 anak terlantar di LKSA selama 1 bulan dengan jumlah nilai Rp. 500.000/anak. Bantuan Premi Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) bagi 9.973 Pekerja Rentan DTKS yang diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan selama 12 bulan. Bantuan Santunan Kematian DTKS sejumlah 175 KPM dengan jumlah bantuan Rp. 1.500.000,00/ KK. Bantuan Sembako dari berbagai Pihak seperti Dunia Usaha, BUMN, maupun Organisasi Masyarakat kepada Masyarakat yang terdampak Covid 19. Bantuan tersebut berupa Beras, Mie, Minyak Goreng, Gula, Masker dan Handsanitizer. Bantuan Makanan Bergizi bagi Penyandang Disabilitas sejumlah 750 KPM. Bantuan Makanan bagi lanjut usia terlantar sejumlah 200 orang. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM kepada masyarakat terdampak Covid 19 sejumlah 145.669 Orang dengan besaran bantuan 150.000 selama 4 bulan. Bantuan makanan bergizi bagi anak stunting sejumlah 135 anak dengan besaran satuan 500.000/anak selama 1 bulan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari anggaran DBHCHT sejumlah 7.975 Orang besaran bantuan 1.200.000/orang melalui 2 tahapan pencairan. Bantuan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada lanjut usia dan disabilitas tunggal sejumlah 313 orang besaran bantuan 600.000/orang. Santunan Kematian kepada anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu sejumlah 165 orang besaran bantuan 200.000/ orang selama 4 bulan. Bantuan sandang kepada penyandang disabilitas terlantar sejumlah 100 orang, lanjut usia terlantar sejumlah 100 orang dan anak terlantar sejumlah 30 anak.

Demikian juga untuk pemberdayaan masyarakat miskin, telah diberikan yang bersumber dari dana APBN Kabupaten Demak meliputi bantuan Kewirausahaan sejumlah 79 KPM bagi Penyandang Disabilitas, UEP bagi korban kekerasan perempuan sejumlah 25 orang, UEP bagi Perempuan produktif sejumlah 120 Orang/ 12 Kelompok dan Bantuan Alat Bantu sejumlah 64 KPM bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra dan Fisik.

Sedangkan untuk kegiatan APBD, antara lain Pendampingan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Dinas Sosial P2PA, yaitu Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) "Wening Ati", PPCI, Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) setempat dan relawan yang peduli Kesejahteraan Sosial. Koordinasi dengan panti Rehabilitasi dalam pembatasan pengiriman sesuai kapasitas panti serta yang tidak terkirim diadakan pembinaan. Pembinaan dan Pelatihan serta diberikan Bantuan kepada PMKS yang potensial, Janda veteran, pendampingan kelompok perempuan warga miskin, UKSBM, UEP serta dukungan dari para pendamping sosial, antara lain: TKSK, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna (KT), Relawan Pekerja sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak	√				80,12	80,32	80,32	80,39	80,12	77,70	80,32	80,39	
2	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak yang mencapai target	√				100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	√				83,68	83,79	83,79	84,52	87,28	87,50	83,79	84,52	
4	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	√				100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	√				67,00	67,20	67,8	68,00	66,83	66,83	67,04	68,00	
6	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	√				69,36	69,36	70,32	70,32	69,36	69,36	70,32	70,32	
7	Skor Kabupaten Layak Anak	√				501-600	501-600	601-700	601-700	575,01	697,4	601-700	601-700	
8	Persentase PPKS yang mandiri	√				0,26	0,45	1,15	1,23	1,25	2,45	1,15	1,23	
9	Persentase Penurunan PPKS	√				8,44	8,66	8,88	9,14	8,84	8,82	8,88	9,14	
10	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	√				100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			√		39,5	40,01	39,5	39,47	34,02	39,5	39,5	39,47	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
12	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			√		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
14	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			√		3,80	3,81	3,9	3,81	3,8	3,93	3,9	3,81	
15	Rasio KDRT			√		0,05	0,05	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
16	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR			√		12	12	12	12	12	12	12	12	
17	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			√		40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	40,79	
18	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur			√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Partisipasi angkatan kerja perempuan			√		57,44	57,67	57,73	54,51	56,52	57,44	57,73	54,51	
20	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			√		100	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
21	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
22	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi 40 social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
23	cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap bantuan hukum			√		28,8	100	100	100	28,8	100	100	100	
24	cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
25	cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
26	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			√		76,05	97,03	97,07	76,05	94,73	76,05	97,07	76,05	
27	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP			√		83,3	87	89,3	83,3	96,86	83,3	89,3	83,3	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
28	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA			√		79,9	79,9	79,9	79,9	81,38	79,9	79,9	79,9	
29	Rasio APM perempuan/laki-laki di di PT			√		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
30	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
31	kontribusi perempuan dalam pekerjaan di sector non pertanian			√		38,74	38,77	38,74	37,33	37,39	37,42	38,74	37,33	
32	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti (41social41or SPM)			√		36,69	100	100	57,06	100	100	100	57,06	
33	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota			√		7,56	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase (%) PMKS yang memperoleh bantuan sosial			√		95,6	94,3	95,50	95,04	90,50	95,6	95,50	95,04	
35	Persentase (%) PMKS yang Tertangani			√		27,29	95,60	97,02	97,51	90,60	95,04	97,02	97,51	
36	Persentase (%)PMKS yang menerima Program Pemberdayaan			√		1,37	100	100	100	1,48	100	100	100	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Sosial melalui KUBE atau kelompok 42ocial ekonomi sejenis lainnya													
37	Persentase (%) Panti Sosial yang menyediakan saran prasarana pelayanan kesejahteraan sosial			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase (%) WKSBM Yang menyediakan Sarana Prasarana			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
39	Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggpa Darurat bencana			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase (%) Korban Bencana Yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat bencana			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase(%) Penyandang Cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			√		26,49	100	100	100	76,44	100	100	100	
42	Persentase (%) PSKS Yang menyediakan Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial			√		14,9	34,84	100	23,99	76,44	14,9	100	23,99	
43	Persentase (%) Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial			√		31,68	54,77	70,78	60,15	90,60	31,68	70,78	60,15	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
44	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Disabilitas Terlantar di luar panti		√			4,33	100	100	4,53	93,20	100	100	4,53	
45	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar lansia Terlantar di luar panti		√			4,13	100	100	21,42	93,81	100	100	21,42	
46	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti		√			1,83	100	100	2,39	80,14	100	100	2,39	
47	Persentase (%) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan pengemisdi luar panti		√			25,4	100	100	25,04	90,42	100	100	25,04	
48	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana dari Kab/Kota		√			100	100	100	100	100	100	100	100	
49	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan			√		0,00014	0,00014	0,00014	0,00012	0,00014	0,00014	0,00014	0,00012	
50	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten			√		12	12	12	12	12	12	12	12	
51	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan			√		16	15	17	17	15	16	17	17	
52	Persentase penyandang disabilitas miskin			√		100	100	100	4,53	59,74	100	100	4,53	
53	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bersyarat/Prgram Keluarga Harapan				√	57379	55529	58547	55529	54709	55529	58547	55529	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
54	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
55	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan				√	3	4	5	6	3	4	5	6	
56	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
57	Rasio kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan responisf gender dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD			√		100	100	100	100	100	100	100	100	
58	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir				√	0.00009 1	0.00009 1	0.00009 1	0,000124	0,00012	0.00009 1	0.000091	0,00012 4	
59	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan				√	0,00014	0,00014	0,00014	0,000178	0,00012	0,00014	0,00014	0,00017 8	
60	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan				√	0,00000 1	0,00000 1	0,00000 1	0,000001	0,00002	0,00000 1	0,000001	0,00000 1	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.													
61	persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan terlayani				√	100	100	100	100	100	100	100	100	
62	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
63	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah				√	30	30	30	14	12	30	30	14	
64	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi				√	53,15	53,15	54,55	53,15	54,55	53,15	54,55	53,15	
65	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
66	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
67	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.				√	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
68	Rasio korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan				√	0,00014	0,00014	0,00014	0,00014	0,00096	0,00041	0,00014	0,00014	

NO	Indikator	IKU	SPM	IKK	SDG's	Target Renstra Dinas Sosial, P2PA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
69	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi				√	12	12	12	12	12	12	12	12	
70	Jumlah penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan				√	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS SOSIAL, P2PA

Pelaksanaan pembangunan daerah selama ini sudah banyak melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan. Masyarakat melalui musrenbangkab dan musrenbangcam, berharap diperoleh prioritas pembangunan yang ada dilingkungannya. Peran pendamping sosial, mitra sosial yang ada dimasyarakat sangat menentukan dalam mengkawal Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah sosial.

Melalui Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang telah dilaksanakan pemerintah sampai tingkat Desa/ Kelurahan akan mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang secara otomatis akan menurunkan angka kemiskinan. Karena melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan akan dapat digali permasalahan yang pokok dilingkungannya masing – masing, apalagi informasi sekarang dengan cepat sosial masuk di masyarakat perdesaan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan komunikasi perlu upaya peningkatan akses informasi dan komunikasi melalui penguatan lembaga komunikasi masyarakat. Untuk tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2021 – 2026, Dinas Sosial, P2PA dalam mendukung visi, misi Bupati Demak masuk dalam misi, kedua dan ketiga yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing, Ditahun 2022 merupakan tahun yang berat bagi Pemerintah Daerah dalam menuntaskan persoalan di masyarakat, karena adanya wabah pandemi covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, meskipun sasaran urusan mendapat penanganan khusus sehingga pencapaian SPM tahun 2022 melebihi target, namun begitu karena jumlah PPKS yang menjadi prioritas SPM jumlahnya lebih banyak dibanding dengan ketersediaan dana. Maka ada beberapa Permasalahan dalam pencapaian target antara lain :

1. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Minimnya Anggaran yang disediakan untuk kegiatan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

3. Belum terencana dengan baik, disebabkan oleh pengumpulan data dari desa yang belum maksimal.
4. Letak geografis di beberapa desa dalam pelaksanaan pendataan yaitu desa yang kesulitan akses penjangkauan.
5. Di saat pelaksanaan, dilakukan verifikasi akhir penerima manfaat tersebut ternyata sudah meninggal, pindah alamat. Hal ini mengakibatkan dinas harus melakukan mekanisme perubahan sasaran guna merubah BNBA tersebut sebagai dasar pembuatan SK Penerima Manfaat.
6. Masih adanya PPKS yang belum mendapatkan Program Perlindungan maupun Program Jaminan Sosial dari pemerintah serta adanya PPKS yang tidak terdeteksi, karena administrasi kependudukan yang hilang, sehingga tidak masuk dalam DTKS.
7. Rendahnya Penanganan PPKS, hal ini disebabkan kurangnya personil PPKS, dalam hal :
 - a. Rendahnya Kesehatan Jasmani, Rohani dan Sosial Anak dan PPKS
 - b. Rendahnya Kualitas Generasi Muda PMKS
 - c. Kurangnya Kemampuan Penyandang Cacat
 - d. Kurangnya kesejahteraan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rawan sosial
 - e. Tingginya mobilitas Tuna sosial (Penyakit sosial)
8. Masyarakat terdampak bencana masih ada ketergantungan pada pemerintah sehingga merasa membutuhkan bantuan logistik secara terus menerus pasca bencana.
9. Peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), Orsos, LSM, PSM dan organisasi Lainnya yang peduli Kesejahteraan Sosial belum optimal, ditambah PSKS yang belum memiliki sertifikat, artinya belum mendapatkan pengetahuan dasar kesejahteraan sosial.
10. Masih adanya kasus kekerasan perempuan dan anak
11. Belum maksimalnya peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
12. Kurangnya komitmen antar OPD atau lintas sektor dalam Pengarusutamaan Gender
13. Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan anak
14. Minimnya sarana dan prasarana lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak

Adapun Peluang dan tantangan dalam meningkatkan Pelayanan SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Peluang :

1. Adanya indikator SPM secara rinci dari Kementerian Sosial, sehingga mudah dalam merencanakan Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Adanya tenaga operator SIKS NG Desa/Kel, sehingga Verifikasi dan Validasi data PMKS/PPKS yang lebih akurat setiap bulannya.
3. Adanya program pengentasan ketergantungan masyarakat miskin dari bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.
4. Mengfungsikan Musrenbangdes/Kel untuk dapat melaksanakan graduasi terhadap masyarakat miskin yang sejahtera.
5. Pendamping Sosial diwajibkan mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis yang bersertifikat.
6. Adanya kerjasama kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat baik tingkat Lokal, Regional maupun Internasional

Tantangan :

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bertambah dari tahun ke tahun.
2. Tingginya populasi PPKS;
3. Rendahnya kesadaran sosial, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial masyarakat
4. Masih ada tingkat ketergantungan PPKS.
5. Belum optimalnya pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) seperti Karang Taruna, PSM, TKSK, WKSBM dan Dunia Usaha serta Peran serta Masyarakat.
6. Masih adanya pola pikir terhadap perempuan sebagai konco wiking.
7. Masih adanya bias gender terkait pemahaman kesetaraan dan keadilan gender.
8. Multikrisis berkepanjangan dan kompleks, menyebabkan permasalahan sosial yang makin berat, pada akhirnya dapat menimbulkan rentannya ketahanan sosial masyarakat.
9. Kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten berdasarkan aspek topografi, kelerengan wilayah sebagian besar Demak adalah

dataran rendah, rawan terhadap banjir dan kekeringan pada saat musim kemarau.

Adapun dampak terhadap capaian Visi-Misi Bupati, SPM, IKK dan lain-lain adalah sebagai berikut :

Dampak Positif :

1. Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial tercapai 96,50%;
2. Adanya Program Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program PBI JKN/ Jaminan Kesehatan.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan dan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas hidup PPKS terhadap pelayanan sosial dasar melalui peningkatan fasilitas pelayanan publik;
5. Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainnya;
6. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial serta jaminan kesejahteraan sosial;
7. Meningkatnya prakarsa dan peran serta aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
8. Persentase Panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial sebesar 100%);

Dampak Negatif :

1. Masih ada tingkat ketergantungan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Bantuan sosial Pemerintah;
2. Belum optimalnya Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk mendukung penanganan PPKS;
3. Pelaksanaan ARG belum menjadi komitmen bersama sesuai Peraturan Bupati;
4. Masih adanya Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan;
5. Rollingisasi pejabat/ staf yang memerlukan pelatihan secara terus menerus untuk memiliki jiwa responsif terhadap perempuan dan anak;

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2022, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Updating data melalui Aplikasi SIKS NG Online.
2. Mengoptimalkan Kemampuan Pendamping Sosial dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Penyebarluasan Informasi PPKS melalui Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk pencegahan dan penanganan PPKS.
5. Perbaiki pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24.693.444.652,- setelah adanya Perubahan Anggaran yang disesuaikan dengan KUA PPAS Tahun 2024 Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menjadi Rp. 27.084.041.500,-. Adanya penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana DBHCHT Kab. Demak dan Dana Hibah/ Bansos yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Bahwa penerapan pemetaan nomenklatur program/kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di TA 2024, ditemukan catatan yang menjadi perbedaan dengan rancangan awal, antara lain :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disesuaikan dengan Kepmendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

2. Adanya perubahan nama sub kegiatan pada program perlindungan khusus anak sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota menjadi sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada kepmendagri belum semua teranggarkan;

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

Kabupaten Demak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan	100%	2.335.690.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Demak	Persentase Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan	100%	776.236.823	
		Kab. Demak	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	80,39%	6.718.373.552		Kab. Demak	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	80,39%	5.382.914.500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokumen	17.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokumen	20.138.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Demak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Demak	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.018.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	3.120.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	6.701.373.552	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	5 Dokumen	5.362.776.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	5.970.313.552	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	4.489.225.100	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Dokumen	731.060.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Dokumen	873.551.400	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	3.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi	2 Laporan	2.898.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.898.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	180.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Persentase administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	177.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	5 Orang	3.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	5 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Peraturan Perundang-Undangan					Peraturan Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	633.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	382.310.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.474.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.207.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	31.642.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.386.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	10 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12 Dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dinamis pada SKPD					Dinamis pada SKPD			
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang diadakan	18 Unit	984.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang diadakan	18 Unit		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	390.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	244.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	275.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	224.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100%	227.771.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	225.771.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpelihara	45 Unit	311.690.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah BMD yang terpelihara	45 Unit	163.257.823	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	72.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	84.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	85.070.223	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	13.050.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	120.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.140.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.997.600	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Demak	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	47,74%	890.670.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Demak	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	47,74%	1.154.990.000	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam yang minta ijin	60 Orang	30.000.000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam yang minta ijin	60 Orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota (Dengan Satuan:orang)	60 Orang	860.670.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota (Dengan Satuan:orang)	60 Orang	1.154.990.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	12.000.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	14 Orang	350.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	14 Orang	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 keluarga		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	330.670.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 lembaga	1.112.990.000	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Demak	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Demak	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Demak	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100%	2.255.150.800	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Demak	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100%	1.394,544.571	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Demak	Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	4.341 Orang	1.895.550.800	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Demak	Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan	4.341 Orang	1.197.007.807	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)					Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)			
	Penyediaan Permakanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500 Orang	771.066.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.758 Orang	332.081.875	
	Penyediaan Sandang	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	910 Orang	100.856.100	Penyediaan Sandang	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	910 Orang	24.965.100	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	143.635.700	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	120.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	60.745.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	34.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	400.165.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	380.166.560	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	40 Orang	140.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	40 Orang	145.054.272	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28.800.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	6.000.000	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	27.580.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	18.100.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15.050.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	115.599.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	69.790.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	130 Orang	54.150.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	100 Orang	20.070.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	22.434.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Orang	22.250.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Demak	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	415 Orang	359.600.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kab. Demak	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	415 Orang	197.536.764	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	5.705.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang		
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	16.420.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	5.250.000	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	32.725.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	8.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	10 Orang	25.300.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai	10 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	6.735.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	153.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Demak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	132.772.364	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Demak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	35.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Demak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	21.814.400	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	4.930.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	4.745.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	24.800.000	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	18.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	33.200.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	23.840.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Demak	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.900.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Demak	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (Dengan Satuan:%)	65,59%	8.332.630.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Demak	Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (Dengan Satuan:%)	65,59%	16.400.493.700	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Demak	Jumlah Anak terlantar yang dilayani (Dengan Satuan:anak)	200 Orang	100.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab. Demak	Jumlah Anak terlantar yang dilayani (Dengan Satuan:anak)	200 Orang	199.999.700	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Demak	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Anak	100.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Demak	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Anak	199.999.700	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK)	266.023 KK	8.232.630.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK)	266.023 KK	16.200.494.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	826.608 Orang	1.292.630.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	826.608 Orang	65.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	311.842 Keluarga	800.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	311.842 Keluarga	495.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	311.842 Keluarga	6.140.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Demak	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	311.842 Keluarga	15.640.494.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Demak	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota (Dengan Satuan:%)	100%	1.575.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Demak	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota (Dengan Satuan:%)	100%	1.009.830.978	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan 67ocial	200 Keluarga	1.375.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan 67ocial	200 Keluarga	964.850.978	
	Penyediaan Makanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	225.000.868	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Sandang	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	100.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	24.975.000	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	425.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	4.885.110	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Demak	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	600.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Demak	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	709.990.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	40 Orang	200.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	40 Orang	44.980.000	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	200.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	44.980.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Demak	Persentase TMP yang Terawat (Dengan Satuan:persen)	100%	113.787.069	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab. Demak	Persentase TMP yang Terawat (Dengan Satuan:persen)	100%	22.195.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP	96 Makam	113.787.069	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP	96 Makam	22.195.200	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	96 Makam	113.787.069	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	96 Makam	22.195.200	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Demak	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%)	60%	665.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Demak	Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif (Dengan Satuan:%)	60%	100.000.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembagaan PUG	42 PD	410.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembagaan PUG	42 PD		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender	50 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	50 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	90.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah		
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah	120.000.000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Perangkat Daerah		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang	Kab. Demak	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan	25 Organisasi	240.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang	Kab. Demak	Jumlah organisasi yang melaksanakan	25 Organisasi	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		pemberdayaan perempuan di bidang politik, 71ocia, 71ocial dan ekonomi			Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, 71ocia, 71ocial dan ekonomi			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen	120.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Dokumen		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Demak	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	120.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Demak	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	100.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	42 Lembaga	15.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	42 Lembaga		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	42 Lembaga	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	42 Lembaga		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		mendapat advokasi dan pendampingan			Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		mendapat advokasi dan pendampingan			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Demak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	430.396.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Demak	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100%	75.000.000	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	15 Dokumen	100.650.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	15 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	85.650.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	15.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	25.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan bagi korban yang memerlukan rujukan	3 Layanan	222.746.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan bagi korban yang memerlukan rujukan	3 Layanan	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	18 Orang	105.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	18 Orang		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	117.746.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	30.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:tahun)	45 Lembaga	107.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:tahun)	45 Lembaga	20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	20.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15 Orang	20.000.000	
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang	82.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	15 Orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Demak	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%)	70%	308.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Demak	Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan (Dengan Satuan:%)	70%	500.000.000	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen pelatihan peningkatan kualitas keluarga	80 Dokumen	308.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen pelatihan peningkatan kualitas keluarga	7 Dokumen	500.000.000	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Dokumen		
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	208.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	500.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Kab. Demak	Persentase Perangkat yang menggunakan data gender	80%	248.129.854	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Kab. Demak	Persentase Perangkat yang menggunakan	80%	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	DATA GENDER DAN ANAK		dan anak (Dengan Satuan:%)			DATA GENDER DAN ANAK		data gender dan anak (Dengan Satuan:%)			
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	50 Dokumen	248.129.854	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak	50 Dokumen	10.000.000	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	108.129.854	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	140.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	10.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Demak	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	70%	368.799.033	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Demak	Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	70%	197.836.000	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	42 Organisasi	253.799.033	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	42 Organisasi	182.836.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Kab. Demak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan	42 Organisasi	143.799.033	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	Kab. Demak	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	42 Organisasi	182.836.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Dokumen	110.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Dokumen		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak	1 Dokumen	115.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak	2 Dokumen	15.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	115.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	15.000.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Demak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%)	100%	451.818.344	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kab. Demak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standart (Dengan Satuan:%)	100%	59.999.728	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kab. Demak	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Pihak	136.500.982	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Kab. Demak	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Pihak	59.999.728	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	15.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Perangkat Daerah	59.999.728	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	121.500.982	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 Layanan	165.063.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 Layanan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	165.063.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20 Dokumen	150.254.362	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20 Dokumen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	100.254.362	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen		
	JUMLAH				24.693.444.652					27.084.041.500	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT

Dari hasil kajian yang telah diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Demak, yang langsung ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak seperti pada table 2.4.

Bahwa usulan program kegiatan pada tabel 2.4 merupakan usulan dari Pimpinan maupun anggota Dewan, dan diterima karena :

1. Kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat, memerlukan penyelesaian yang kedua belah pihak dibutuhkan solusi yang menjadikan kedua sepakat.
2. Hibah Bantuan LKSA AL – Huda Desa Gaji Kecamatan Guntur yang diperuntukan untuk pembangunan/ rehabilitasi bangunan.
3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan usaha dalam menaikkan perekonomian keluarganya.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Kabupaten Demak Tahun 2024

Dinas Sosial, P2PA Kab. Demak

NO	Pekerjaan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan
1.	Hibah Panti Asuhan AL-Huda Desa Gaji Kecamatan Guntur	Desa Gaji Kecamatan Guntur	Belanja Hibah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Panti Asuhan (1Pekerjaan/Paket)	40.000.000	1 Unit	Diterima
2.	Hibah Untuk KUBE Lakoni Karya	Desa Sriwulan RT 01 RW 02 Kec. Sayung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
3.	Hibah Untuk KUBE Nazayusa Konveksi	Desa Sriwulan RT 10 RW 03 Kec. Sayung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
4.	Hibah Untuk KUBE Kreasi Sarana Recon	Desa Sriwulan RW 03 Kec. Sayung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
5.	Hibah Untuk KUBE Mitra Abadi	Desa Sriwulan RW 06 Kec. Sayung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
6.	Hibah Untuk KUBE Enggal Karya Manunggal	Desa Sriwulan RT 08 RW 05 Kec. Sayung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
7.	Hibah kepada KUBE Bintoro Demak	Bintoro Kec. Demak	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
8.	Hibah kepada KUBE Mangunjiwan	Mangunjiwan Kec. Demak	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
9.	Hibah Kepada KUBE Babalan	Desa Babalan Kec. Wedung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
10.	Hibah kepada KUBE Gayang Karangrejo	Desa Karangrejo Kec. Bonang	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima

11.	Hibah kepada KUBE Serangan	Desa Serangan Kecamatan Bonang	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	20.000.000	1 Kelompok	Diterima
12	Hibah kepada POS Paud Bunga Anggrek	Kabupaten Demak	Belanja Hibah Uang (1Pekerjaan/Paket)	65.000.000	1 paket	Diterima
13.	Adventorial Media Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belanja Hibah Uang (1 Pekerjaan/ Paket)	200.000.000	100 kali	Diterima
14.	Keserasian Sosial Babalan (Makam)	Desa Babalan Kecamatan Wedung	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	100.000.000	1 paket	Diterima
15.	Keserasian Sosial Bakem (Makam)	Desa Tridonorejo Kecamatan Bonang	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	150.000.000	1 paket	Diterima
16.	Keserasian Sosial Kelurahan Kalicilik (Makam)	Kelurahan Kalicilik Kec. Demak	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	200.000.000	1 paket	Diterima
17.	Keserasian Sosial Palembang Kelurahan Bintoro (Makam)	Kelurahan Bintoro Kec. Demak	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	100.000.000	1 paket	Diterima
18.	Keserasian Sosial Karangmlati (Makam)	Karangmlati Kec. Demak	Belanja Hibah Barang (1Pekerjaan/Paket)	100.000.000	1 paket	Diterima
	Total Anggaran			1.205.000.000		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam **rancangan rencana kerja Perangkat Daerah** dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Pasal 273 ayat (3) disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai 82ocial82or kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kinerja (Renja) akhir Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2023, disusun sebagai dokumen Perencanaan tahunan (1 tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan dalam lima tahun kedepan akan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Tujuan dan Sasaran Kementerian Sosial, antara lain :

- a. Penerapan SPM
- b. Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan;
- c. Daerah yang memanfaatkan system perencanaan, penganggaran dan monev terpadu dalam proses penyusunan program – program penanggulangan kemiskinan.
- d. Sistem perlindungan Sosial adaptif adopsi ke dalam program – program perlindungan Sosial yang ada di daerah
- e. Menurunnya angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunnya prevalensi stunting hingga 19%
- f. Meningkatkan ketepatan sasaran, dan efektifitas program bantuan Sosial non tunai

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Urusan Sosial, antara lain :

1. Prioritas Nasional II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan/Kegiatan Prioritas (KP): Kelembagaan dan keuangan daerah

Untuk di daerah : Persentase capaian penerapan SPM di daerah.

2. Prioritas Nasional III: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing/ Terwujudnya Pengendalian Penduduk dan menguatnya tata Kelola Kependudukan.

Untuk di daerah :

- Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan.
 - Persentase Provinsi/Kab/Kota yang memanfaatkan system perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program – program penanggulangan kemiskinan.
 - Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
 - Persentase Instansi pusat dan daerah yang mengadopsi system perlindungan Sosial adaptif.
 - Persentase Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip – prinsip Kabupaten / Kota.
3. Major Project : Percepatan penurunan Kematian Ibu dan stunting
Arah pembanguann daerah : Penurunan kematian Ibu dan stunting
 4. Major Project : Integrasi bantuan Sosial menuju perlindungan Sosial menyeluruh.

Adapun Arah Kebijakan Nasional Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Indeks Pembangunan Gender;
2. Indeks Pemberdayaan Gender;
3. Indeks Perlindungan Anak; (Peningkatan Pemenuhan hak dan perlindungan anak);
4. Proporsi perempuan berusia 20 – 24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun (pencegahan Perkawinan Anak);
5. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak (Peningkatan peran Ibu dan Keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak;
6. Perlindungan khusus Anak (Penurunan Kekerasan terhadap anak);

7. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan (Meningkatnya layanan perlindungan anak korban kekerasan);
8. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam kewirausahaan);
9. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (Menurunnya kekerasan terhadap perempuan).

Adapun arah kebijakan pembangunan Nasional urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, antara lain :

1. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak (pemenuhan hak anak, kualitas keluarga, perlindungan khusus anak);
3. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan (Kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan);

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Demak tahun 2021-2026 dalam kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai standar serta jaminan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang didukung dengan peningkatan kualitas tenaga kerja serta pembangunan infrastruktur strategis (jalan dan jembatan), penguatan pedesaan dan keterpaduan perkembangan kota dan desa di wilayah Kabupaten Demak.

Sasaran dari Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2021-2026 yang berhubungan dengan misi ketiga dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain adalah Tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mengalami peningkatan di tahun 2022 ini tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak mencapai 12,09 % jika dibandingkan dengan tahun 2021 menurun 0,83%. Angka kemiskinan tersebut melebihi angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 10,98%. Dan Kabupaten Demak masih dalam kategori merah untuk tingkat kemiskinannya.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak selama 20 tahun ke depan untuk mewujudkan kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan yang agamis dan demokratis yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

adalah Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan.

Bahwa sasaran dari Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Demak tahun 2021-2026 yang berhubungan dengan misi ketiga dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, maka memiliki peran penting dalam Meningkatnya penanganan PMKS dan Penanggulangan kemiskinan secara terpadu serta meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan, guna mendukung tercapainya sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak adalah **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** dan **Tingkat kemiskinan** sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mengambil tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- TUJUAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 1 : Meningkatnya Capaian Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- TUJUAN 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 2 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif
- TUJUAN 3 : Meningkatkan Kesetaraan Gender , Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- SASARAN 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender
: Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
- TUJUAN 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS
- SASARAN 4 : Menurunnya Tingkat PPKS
- TUJUAN 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana
- SASARAN 5 : Meningkatnya Pemulihan Sosial Perlindungan Korban Bencana

Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2024 di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tujuan 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Nilai Sakip Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	Penilaian dilakukan olh Inspektorat berdasarkan Permen No 12 tahun 2015	skor	79,87	80,12	80,32	80,36	80,39	80,4 3	80,5	80,5
		Meningkatnya capaian sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA	Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Persentase Dinas Sosial, P2PA yang menyelesaikan laporan kinerja	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100
	Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA		IKM	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi	skor	83,57	83,68	83,79	84,31	84,52	84,6 8	84,75	84,75
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase Keluhan masyarakat yang Ditindaklanjuti	Jumlah target indikator sasaran dibagi jumlah indikator sasaran x 100 persen (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
						2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Tujuan 3 : Meningkatkan kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Tiga komponen dalam IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	%	66,85	66,85	67,2	67,8	68	68,5	70	70
			IKKA	Tingkat kebutuhan anak dan pemenuhan penghindaran resiko sesuai KHA dalam setiap tahapan kehidupan anak	%	69,36	69,36	69,36	70,32	70,32	70,3 2	70,69	70,69
		Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	Skor KLA	Angka / Nilai Pemenuhan Hak Anak yang diukur dengan indikator KLA hasil evaluasi Kementerian	Skor	501 - 600	501 - 600	501 - 600	601 - 700	601 - 700	601 - 700	601 - 700	601 - 700
3	Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase Kemandirian PPKS	Jumlah PPKS yang telah keluar DTKS dibagi dengan jumlah PPKS yang mendapatkan program kali 100%	%	n/a	0,26	0,45	1,15	1,23	1,08	1,5	1,5
		Sasaran 1. Menurunnya Tingkat PPKS	Persentase (%) Penurunan PPKS	Jumlah PPKS yang mengalami graduasi ditambah keluar DTKS dibagi dengan jumlah Populasi PPKS kali 100%	%	8,27	8,44	8,66	8,88	9,14	9,38	9,62	9,62
4	Tujuan 5 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana		Pertumbuhan desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD									
		Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan korban Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Sudah Pulih Fungsi Sosialnya	Jumlah Korban Bencana dibagi dengan jumlah Korban yang Ada kali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam **rancangan rencana kerja Perangkat Daerah** dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD dan Pasal 273 ayat (3) disebutkan bahwa Rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Program/Kegiatan :

Dalam pengentasan kemiskinan dari Pemerintahan Pusat (Kementerian Sosial) ada program yang rencananya dilaksanakan selama 3 - 6 tahun yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah Program perlindungan sosial melalui pemberian uang / bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), selama keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Sebagai imbalannya KSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yaitu pendidikan dan Kesehatan.

Adapun kewajibannya adalah :

- Memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke Fasilitas Kesehatan (Puskesmas dll);
- Menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan (anak usia SD dan SLTP dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar.
- Anggota keluarga terdapat disabilitas.
- Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga terdapat lansia.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam visi, misi Bupati Demak tahun 2021-2026 masuk dalam misi kedua dan ketiga. Dalam rangka perwujudan misi, yang menjadi program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang mendukung Urusan Sosial adalah :

- a. Pemberdayaan Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial;
- c. Perlindungan dan jaminan Sosial;
- d. Penanganan Bencana;
- e. Pengelolaan TMP.

Sedangkan dalam rangka perwujudan misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih 2021-2026 terdapat program unggulan /prioritas yaitu Peningkatan peran serta perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan kesehatan gizi anak serta penanganan permasalahan sosial. Dan yang menjadi program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang mendukung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan ;
2. Perlindungan Perempuan;
3. Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Pengelolaan Data Gender dan Anak;
5. Pemenuhan hak Anak;
6. Perlindungan Khusus Anak.

Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta)

dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap kemiskinan.

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya secara koordinatif, integratif, sinkronisasi dan sinergis.

Pemerintah terus berupaya untuk melembagakan perlindungan sosial ini ke dalam program kemiskinan dalam Klaster 1 sebagai cara memutus siklus kemiskinan dan meminimalkan dampak guncangan ekonomi pada masyarakat miskin. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan dan perlindungan sosial adalah meningkatkan ketepatan sasaran, dan meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan serta dapat memanfaatkan aset yang mereka miliki sebagai bekal untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Program dan Kegiatan

- a. Faktor yang menjadi Pertimbangan Program dan Kegiatan
Pemilihan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomo 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, program dan kegiatan yang dipilih ditentukan indikatornya agar indikator sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai.
- b. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2024 sebanyak 6 Program urusan sosial dan 6 program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan Sosial memiliki 6 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub

Kegiatan sedangkan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki 6 Program, 9 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan. Renja Dinas Sosial, P2PA Tahun 2024 program prioritas adalah sebagai berikut : Program dan Kegiatan Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak, sesuai Kepmendari Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan kegiatan Dinsos, P2PA Kab. Demak

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Alat Bantu
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Pemberian Layanan Rujukan
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan
		Penyediaan Permakanan
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Pemberian Layanan Rujukan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak – Anak Terlantar	Penjangkauan Anak – Anak Terlantar
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan SOSial kesejahteraan Keluarga
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan
		Penyediaan Sandang
		Pelayanan Dukungan Psikososial
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Penyajian dan Pemanfaatan Data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampngan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Demak

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						27.084.041.500,00							22.322.381.912,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.982.054.449,00							11.646.292.932,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						19.982.054.449,00							11.646.292.932,00	
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	-			50%	1.154.990.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02 .2.03	Pengembanga n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Peserta Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Ssosial Daerah Kab/Kota	-			60 orang	1.154.990.000 ,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS)	-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.02 .2.03.0 001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	12.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS)		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.02 .2.03.0 002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	20.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlingkungan dan rehabilitasi sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02 .2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Lembaga	1.122.990.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlingkungan dan rehabilitasi sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	-			100 %	1.394.544.571,00						-	2.112.790.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti													
	1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Pm Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	-			4341 orang	1.197.007.807,00			-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	-	1.847.060.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04 .2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan				1758 Orang	332.081.875,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		771.066.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/Kota													
	1.06.04 .2.01.0 002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				910 Orang	24.965.100,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		100.856.10 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.04 .2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				65 Orang	120.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		143.635.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	34.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		35.505.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	380.166.560,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		400.165.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	145.054.272,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	6.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlingkungan dan rehabilitasi sosial	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		28.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04 .2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	27.580.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlingkungan dan rehabilitasi sosial	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04 .2.01.009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	15.050.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlingungan dan rehabilitasi sosial	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		18.100.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	69.790.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		115.599.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan				100 Orang	20.070.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak		30.900.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM			terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.04 .2.01.0 012	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	22.250.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		22.434.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan	Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	-			415 orang	197.536.764,0 0			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS	-	265.730.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		NAPZA di Luar Panti Sosial														
	1.06.04 .2.02.0 002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	5.250.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		16.420.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.04. 2.02.00 03	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	8.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		32.725.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04. 2.02.00 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	132.772.364,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		153.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04. 2.02.00 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan				11 Orang	21.814.400,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/Kota													
	1.06.04. 2.02.00 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	24.800.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		4.745.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04. 2.02.00 13	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	4.900.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	PMKS Lainnya selain HIV/AIDS		23.840.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	-			65,59 %	16.400.493.70 0,00						-	7.508.502.1 32,00	
	1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang dilayani	-			200 anak	199.999.700,0 0			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Anak Terlantar di dalam Panti/LKSA	-	110.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.05. 2.01.00 01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	199.999.700,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Anak Terlantar di dalam Panti/LKSA		110.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir	Jumlah Fakir Miskin yang	-			266023 KK	16.200.494.00 0,00			-	9. Peningka tan	Masyarakat miskin/Tida k Mampu	-	7.398.502.1 32,00	DINAS SOSIAL,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota	masuk dalam pengelolaan data									keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial				PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.05 .2.02.0 001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				826608 Orang	65.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Masyarakat miskin/Tida k Mampu		1.300.834.1 32,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.05 .2.02.0 002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/K ota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				311842 Keluarga	495.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Masyarakat miskin/Tidak Mampu		900.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				311842 Keluarga	15.640.494.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat	Masyarakat miskin/Tidak Mampu		5.197.668.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.06	PROGRAM PENANGNANA BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima	-			100 %	1.009.830.978,00						-	2.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			perlindungan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota													
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	-			200 keluarga	964.850.978,00			-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.525.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	225.000.868,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANNYA BIDANG KESEHATAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06 .2.01.0 002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	24.975.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG KESEHA TAN	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		100.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.06 .2.01.0 004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	4.885.110,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		425.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06 .2.01.0 005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	709.990.000,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Korban Bencana Alam dan Sosial		750.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.06 .2.02	Penyelenggara an Pemberdayaa n Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/K ota	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan kesiapsiagaan bencana	-			25000 orang	44.980.000,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Taruna Siaga Bencana/ Relawan Sosial	-	500.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	1.06.06 .2.02.0 002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang				40 Orang	44.980.000,00	Kab. Demak,	DANA	-	9. Peningka	Taruna Siaga		500.000.00 0,00	DINAS SOSIAL,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		tan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Bencana/ Relawan Sosial			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase TMP yang Terawat	-			100 %	22.195.200,00						-	0,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP	-			96 makam	22.195.200,00			-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Taman Makam Pahlawan	-	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.2.01.002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				96 Makam	22.195.200,00	Kab. Demak, Demak, Kalicilik	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlin dungan dan rehabilitasi sosial	Taman Makam Pahlawan		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						942.835.728,00							2.534.085.428,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						942.835.728,00							2.534.085.428,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSU TAMAAAN	Persentase kelembagaan PUG aktif	-			60 %	100.000.000,00						-	192.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN														
	2.08.02 .2.02	Pemberdayaa n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Organisasi yang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-			25 organisas i	100.000.000,0 0			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	organisasi masyarakat	-	192.000.000 ,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.02 .2.02.0 002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Organisa si	100.000.000,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	organisasi masyarakat		192.000.000 ,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	Persentase Korban kekerasan perempuan yang terlayani sesuai standar	-			100 %	75.000.000,00						-	437.746.000 ,00	
	2.08.03 .2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			1 Dokumen	25.000.000,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Korban Kekerasan Perempuan	-	30.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03 .2.01.0 002	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/K ota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				42 perangka t daerah Perangka t Daerah	25.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Korban Kekerasan Perempuan		30.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.03 .2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	Jumlah korban kekerasan yang memerlukan rujukan Jumlah layanan bagi korban yang memerlukan rujukan Jumlah Layanan bagi korban yang	-			12 bulan 3 Layanan 3 Layanan	30.000.000,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Lembaga Perlindunga n Perempuan	-	387.746.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kabupaten/Kota	memerlukan rujukan													
	2.08.03 .2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 layanan Layanan	30.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Lembaga Perlindungan Perempuan		387.746.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03 .2.03	Penguatan dan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan	-			45 lembaga	20.000.000,00			-	9. Peningkatan	Lembaga Perlindungan	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	perempuan yang disediakan									keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Perempuan			PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.03 .2.03.0 002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/K ota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi				15 orang Orang	20.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan	Lembaga Perlindunga n Perempuan		20.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							PENDIDI KAN		rehabilita si sosial				
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	-			70 %	500.000.000,0 0						-	760.000.00 0,00	
	2.08.04 .2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Laporan Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	-			2 Dokumen	500.000.000,0 0			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Perempuan Produktif	-	760.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04 .2.01.0 003	Pengembang an Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Dokumen	500.000.000,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Perempuan Produktif		760.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan	-			80 %	10.000.000,00						-	387.169.71 4,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DATA GENDER DAN ANAK	data gender dan anak													
	2.08.05 .2.01	Pengumpulan , Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Dokumen dalam Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data gender dan anak	-			70 Dokumen	10.000.000,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	OPD dan Pihak ketiga	-	387.169.71 4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.05 .2.01.0 002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/K ota														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam				50 dokumen Dokumen	10.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an,	DANA TRANSF ER UMUM- DANA	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin	OPD dan Pihak ketiga		387.169.71 4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM		dungan dan rehabilita si sosial				PERLINDUN GAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak Dalam Implementasi KLA	-			70 %	197.836.000,0 0						-	742.169.71 4,00	
	2.08.06 .2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/K ota	Jumlah Peserta Kegiatan Kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah	-			230 orang	182.836.000,0 0			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	organisasi masyarakat, Tokoh agama dll	-	387.169.71 4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.06 .2.01.0 001	Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kewenangan Kabupaten/K ota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				42 Organisa si	182.836.000,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTU KAN P ENGGUN AANN YA BIDANG PENDIDI KAN	-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	organisasi masyarakat, Tokoh agama dll		387.169.71 4,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.06 .2.02	Penguatan dan Pengembang an Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	-			80 Dokumen	15.000.000,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Lembaga Perlindunga n Anak	-	355.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kabupaten/Kota														
	2.08.06 .2.02.003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Lembaga Perlindungan Anak		355.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNG AN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standar	-			100 %	59.999.728,00						-	15.000.000, 00	
	2.08.07 .2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/K ota	Jumlah Pihak yang terlibat dalam Pencegahan Kekerasan terhadap anak	-			4 lembaga	59.999.728,00			-	9. Peningka tan keberda yaan, perlin dungan dan rehabilita si sosial	Lembaga Perlindunga n Anak	-	15.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	2.08.07 .2.01.0 004	Advokasi dan pendampinga n Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				42 Orang	59.999.728,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN AANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Lembaga Perlindungan Anak		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X	NON URUSAN						6.159.151.323,00							8.142.003.552,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						6.159.151.323,00							8.142.003.552,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Dinas Sosial, P2PA yang ditindaklanjuti	-			80,39 %	6.159.151.323,00						-	8.142.003.552,00	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan laporan kinerja Daerah	-			10 dokumen	20.138.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan	Dokumen Perencanaan PD	-	17.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pelayana n publik berbasis smart city				PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Dokumen Perencanaan PD		5.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan				2 Dokumen	4.018.000,00	Kab. Demak, Semua	DANA TRANSF ER	-	-	Dokumen Perencanaan PD		4.000.000,0 0	DINAS SOSIAL,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Kecamat an, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM						PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Dokumen Perencanaan PD		3.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD				8 Laporan	3.120.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Dokumen Perencanaan PD		5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan	-			5 dokumen	5.362.776.500,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Dokumen Keuangan PD	-	6.820.313.552,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berbasis smart city				
	X.XX.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	4.489.225.100 ,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Dokumen Keuangan PD		6.070.313.5 52,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				29 Dokumen	873.551.400,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan	Dokumen Keuangan PD		750.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pelayana n publik berbasis smart city				
	X.XX.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi2	-			2 Laporan	2.898.000,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Barang Milik Daerah (BMD)	-	3.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.03. 0006	Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2.898.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis	Barang Milik Daerah (BMD)		3.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												smart city				
	X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	382.310.000,0 0			-	4. Perbaik an tata kelola pemerint ah an yang adaptif dan kolaborat if 2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Dokumen administrasi umum PD	-	721.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.474.400,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Dokumen administrasi umum PD		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	94.207.500,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Dokumen administrasi umum PD		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	31.642.100,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	Dokumen administrasi umum PD		12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	16.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dokumen administrasi umum PD		25.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dokumen administrasi umum PD		14.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	10.600.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an,	DANA TRANSF ER UMUM- DANA	-	-	Dokumen administrasi umum PD		20.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM						PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.06. 0009	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	207.386.000,0 0	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Dokumen administrasi umum PD		360.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.06. 0010	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan	Dokumen administrasi umum PD		10.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pelayana n publik berbasis smart city				PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	-			18 unit	0,00			-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Barang Milik Daerah (BMD)	-	160.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis	Barang Milik Daerah (BMD)		160.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												smart city				
	X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan yang tersedia	-			100 %	227.771.000,0 0			-	-	Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	-	224.000.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD		4.000.000,0 0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	225.771.000,0 0	Kab. Demak, Semua	DANA TRANSF ER	-	-	Dokumen Jasa		220.000.00 0,00	DINAS SOSIAL,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Kecamat an, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM			Penunjang Urusan PD			PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-			45 unit	163.257.823,0 0			-	-	Barang Milik Daerah (BMD)	-	196.690.00 0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an,	DANA TRANSF ER UMUM- DANA	-	-	Barang Milik Daerah (BMD)		82.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM						PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	85.070.223,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Barang Milik Daerah (BMD)		84.540.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	13.050.000,00	Kab. Demak, Semua	DANA TRANSF ER	-	-	Barang Milik Daerah (BMD)		10.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kecamat an, Semua Kel/Desa	UMUM- DANA ALOKASI UMUM						PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				20 Unit	10.140.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Barang Milik Daerah (BMD)		10.150.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	X.XX.0 1.2.09. 0011	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi				5 Unit	4.997.600,00	Kab. Demak, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan tata kelola pem erintaha n dan pelayana n publik berbasis smart city	Barang Milik Daerah (BMD)		10.000.000, 00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK
	J U M L A H							27.084.041.5 00,00							22.322.381 .912,00	

4.2. Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak membidangi urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang SOTKF Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, dalam menunjang program prioritas Bupati Demak tahun 2024 pada Program Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Program Peningkatan Keberdayaan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Implementasi kegiatan yang mendukung program prioritas tersebut dikarenakan adanya Sumber Daya Manusia (SDM)/ Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang profesional dalam bidangnya serta dukungan anggaran dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar dan menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Sasaran pada program prioritas ini antara lain Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Rumah Tangga Miskin (RTM)/ Masyarakat miskin/tidak mampu.

Tabel rencana program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN												
	Koordinasi aksi konvergensi dan perencanaan penurunan stunting	Jumlah KPM PKH yang memiliki anak stunting yang mengikuti FDS Gizi dan Kesehatan	Keluarga	-	25	21.450.000	295	200.000.000	495	200.000.000	1.045	1.6.5.2.02.2	
9	PENINGKATAN KEBERDAYAAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL												
a	Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru	Jumlah tenaga kerja baru yang dimagangkan dan atau disalurkan	orang	-	35	54.450.000	60	41.444.000	74	49.830.000	130		
	Pemagangan tenaga kerja disabilitas	Jumlah difabel yang dimagangkan	orang	-	15	27.000.000	30	19.010.000	40	27.580.000	65	1.6.4.2.01.8	
	Penyaluran tenaga kerja disabilitas	Jumlah difabel yang disalurkan	orang	-	20	27.450.000	30	22.434.000	34	22.250.000	65	1.6.4.2.01.8	
e	Bantuan sosial untuk RTM/difabel/ lansia	Jumlah RTM/Difabel/Lansia yang mendapat bantuan sosial	orang	3.308	1.340	1.034.905.700	1.570	1.443.300.000	575	705.166.260	14.845		
	Pemberian bansos untuk RTM	Jumlah Warga Miskin dalam DTKS yang mendapat Santunan Kematian	Orang	1.211	340	393.000.000	1.000	1.000.000.000	-	-	4.000	1.6.5.2.02.2	

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pemberian bansos untuk difabel	Jumlah difabel yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	1.597	362	260.015.700	200	200.000.000	65	120.000.000	5.000	1.6.4.2.01.3	
	Pemberian bansos untuk lansia	Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Bantuan Sosial	Orang	200	332	195.890.000	150	150.000.000	180	380.166.560	5.000	1.6.4.2.01.3	
	Pemberian bansos untuk anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar (PM Panti) yang mendapat Bantuan Santuan Orang Satuan Harian (SOSH)	Anak	300	300	180.000.000	200	90.000.000	300	199.999.700	800	1.6.5.2.01.1	
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan layanan sandang di Rumpelsos	Anak	-	16	6.000.000	20	3.300.000	30	5.000.000	45	1.6.4.2.01.2	
h	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) - on line	Persentase desa yang menerapkan SLRT-online	%	100	100	496.010.200	100	1.333.720.000	100	65.000.000	100		
	Pemeliharaan aplikasi SLRT	Jumlah Data yang di Update oleh Operator Kabupaten	Data	546.993	-	-	311.842	25.000.000	-	-	311.842	1.6.5.2.02.1	
	Verifikasi dan validasi data	Jumlah data yang diverifikasi dan validasi oleh operator SIKS NG Desa dan Kelurahan	Data	546.993	821.998	496.010.200	826.592	1.308.720.000	826.608	65.000.000	826.608	1.6.5.2.02.1	

BAB V

PENUTUP

Rencana kinerja Akhir Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2024 merupakan suatu dokumen formal dalam kaitannya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu dasar Instrumen yang digunakan oleh komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

RENJA akhir merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran yang lebih detail mengenai Tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan waktu satu tahun dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak akan melaksanakan 24 Kegiatan dalam 12 Program untuk mencapai 10 sasaran 5 tujuan yang telah ditetapkan dengan jumlah anggaran Rp. 27.084.041.500,-. Dengan harapan seluruh program dan Kegiatan tersebut dapat terlaksana dan direalisasi secara baik sesuai apa yang telah direncanakan.

A. Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan yang sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial, P2PA tahun 2021 - 2026, namun dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan peraturan ini sudah dilaksanakan, untuk mencermati peraturan tersebut maka dilakukan mapping/pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan tersebut. Terkait adanya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Tahun 2023 makanya kebutuhan adanya verifikasi dan validasi sangat penting dilakukan dan dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang

cukup. Diharapkan di Tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% sesuai dengan arahan Presiden RI.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Demak tahun 2021-2026 ada beberapa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak yang belum tercapai sesuai dengan target, hal ini akan berimplikasi pada pendanaan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya salah satu indikator yang belum tercapai dimungkinkan akan ditambahkan sehingga diakhir tahun RPJMD dapat tercapai, namun disisi yang lain OPD yang telah tercapai akan dikurangi anggaran. Untuk mensikapi bila anggaran proram dan kegiatan dikurangi untuk hal tersebut diatas, maka dipilih program dan kegiatan yang sangat prioritas untuk mendukung penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENJA akhir tahun 2024. RENJA akhir tahun 2024 merupakan acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJA akhir tahun 2024 , antara lain :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program-program RENJA akhir tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. RENJA akhir tahun 2024 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik.
3. Pada akhir tahun anggaran 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2024, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan Program, OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan di OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024, di bidang Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Pembinaan, Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Mengadakan sosialisasi program Kesejahteraan sosial dalam Penanganan PPKS kepada Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, PSM, Karang Taruna dan Dunia Usaha.
3. Pembinaan, bintek / bintang dan pelatihan serta mendorong para pengurus lembaga/ Orsos untuk dapat meningkatkan pengelolaan administrasi dan manajemen lembaga / Orsos.
4. Pembinaan, pelayanan, jaminan dan menggugah masyarakat yang mampu atau Dunia usaha untuk dapat membantu warga masyarakat yang terkena bencana dan dalam penanganan PPKS.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menurunkan tindak kekerasan terhadap anak.
6. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dengan cara memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak kekerasan.
7. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan.

Keberhasilan Program dan Kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Demak bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semata. Namun

pertisipasi dan dukungan dari berbagai pihak senantiasa sangat kami harapkan baik di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial, Pekerja Sosial, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Forum Anak, organisasi perempuan, masyarakat luas dan Instansi / Lembaga terkait dan stakeholder lainnya.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Akhir (Renja) Tahun 2024 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dan dipedominya untuk meningkatkan Kinerja sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah menjadi Komitmennya.

Lampiran 1.

PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021-2026

DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / INDUK	BIDANG INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / INDUK	BIDANG INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	0 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				1	0 6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				DINSOS P2PA
1	0 6	0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	1	0 6	0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	DINSOS P2PA
1	0 6	0 2	2.0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam yang minta ijin	lembaga	1	0 6	0 2	2.0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah calon Pengumpul sumbangan dalam yang minta ijin	lembaga	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	DINSOS P2PA
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota	Orang	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat	Orang	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/Ko ta	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a								Kabupaten/Ko ta	Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a		
1	0 6	0 2	2.0 3	0 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a	Keluarga	1	0 6	0 2	2.0 3	000 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a	Keluarga	DINSOS P2PA
1	0 6	0 2	2.0 3	0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a	Lembaga	1	0 6	0 2	2.0 3	000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot a	Lembaga	DINSOS P2PA
1	0 6	0 2	2.0 3	0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Sertifikat	1	0 6	0 2	2.0 3	000 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Sertifikat	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSIAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Orang	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Kabupaten/Kot a									Kabupaten/Kot a		
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / TANGGUNG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / TANGGUNG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Orang	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang menerima	Orang	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza yang menerima	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti									layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti		
1	0 6	0 4	2.0 2	0 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	0 6	0 4	2.0 2	000 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	0 6	0 4	2.0 2	0 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	0 6	0 4	2.0 2	000 2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	0 6	0 4	2.0 2	0 3	Penyediaan Permakanan	Terpenuhiya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	0 6	0 4	2.0 2	000 3	Penyediaan Permakanan	Terpenuhiya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / INDUK	BIDANG / INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / INDUK	BIDANG / INDUK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhi Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Kot a								Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Kot a		
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Fakir Miskin Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak terlantar yang dilayani	Anak	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				DINSOS P2PA
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data	KK	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data	KK	DINSOS P2PA
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	DINSOS P2PA
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	DINSOS P2PA
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota	%	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Perlindungan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten kota	%	DINSOS P2PA
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Keluarga	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	Keluarga	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / LIDHSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / LIDHSAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	DINSOS P2PA
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Orang	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Kot a								Kabupaten/Ko ta	Kabupaten/Kot a		
1	0 6	0 6	2.0 1	0 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	0 6	0 6	2.0 1	000 5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	0 6	0 6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	Orang	1	0 6	0 6	2.0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	Orang	DINSOS P2PA
1	0 6	0 6	2.0 2	0 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	1	0 6	0 6	2.0 2	000 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kot a	Orang	DINSOS P2PA
1	0 6	0 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang Terawat	%	1	0 6	0 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang Terawat	%	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUPAN	BIDANG TANGKUPAN / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pengunjung Taman Makam Pahlawan	Orang	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Pengunjung Taman Makam Pahlawan	Orang	DINSOS P2PA
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	DINSOS P2PA
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				DINSOS P2PA
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	%	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	%	DINSOS P2PA
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	Perangkat Daerah	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	Perangkat Daerah	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk	Perangkat Daerah	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk	Perangkat Daerah	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Responsif Gender (PPRG)	Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kot a								Responsif Gender (PPRG)	Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kot a		
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Perangka t Daerah	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustama an Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaa n Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kot a	Perangka t Daerah	DINSOS P2PA
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada	Organisa si	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada	Organisa si	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / JANGKA JUDUL	BIDANG JUDUL	PROGRAM JUDUL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / JANGKA JUDUL	BIDANG JUDUL	PROGRAM JUDUL	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Organisasi Masyarakat									Organisasi Masyarakat		
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Organisasi	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Organisasi	DINSOS P2PA
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase korban kekerasan perempuan	%	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase korban kekerasan perempuan	%	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG LINDIGAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG LINDIGAN /	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							yang terlayani sesuai standar									yang terlayani sesuai standar		
2	0 8	0 3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Dokume n	2	0 8	0 3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Dokume n	DINSOS P2PA
2	0 8	0 3	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	2	0 8	0 3	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	DINSOS P2PA
2	0 8	0 3	2.0 1	0 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Perangka t Daerah	2	0 8	0 3	2.0 1	000 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	Perangka t Daerah	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Kabupaten/Kota									Kabupaten/Kota		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang memerlukan Rujukan	Orang	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang memerlukan Rujukan	Orang	DINSOS P2PA
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	DINSOS P2PA
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Layanan	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						dan Sinkronisasi	Kabupaten/Kot a									Kabupaten/Kot a		
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan	tahun	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang disediakan	tahun	DINSOS P2PA
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	DINSOS P2PA
2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	Orang	2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TANGKUPAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Spesifik								Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase lembaga penyedia layanan bagi Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	DINSOS P2PA
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Laporan	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan pelatihan peningkatan kualitas keluarga	Laporan	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat yang menggunakan data gender dan anak	%	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat yang menggunakan data gender dan anak	%	DINSOS P2PA
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak		Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan,	Dokumen	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak		Jumlah dokumen dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan,	Dokumen	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
					Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		analisis dan penyajian data gender dan anak							Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		analisis dan penyajian data gender dan anak		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	%	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan Hak Anak dalam Implementasi KLA	%	DINSOS P2PA
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada	Organisasi	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		Jumlah organisasi yang melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada	Organisasi	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGKUP	BIDANG TUGAS / TANGKUP	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGKUP	BIDANG TUGAS / TANGKUP	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
					Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga Pemerintahan							Kewenangan Kabupaten/Kota		Lembaga Pemerintahan		
2	0 8	0 6	2.0 1	0 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	2	0 8	0 6	2.0 1	000 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	DINSOS P2PA
2	0 8	0 6	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0 8	0 6	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan oengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak	Dokumen	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan oengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kulaitas hidup anak	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	DINSOS P2PA
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dokumen	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG INDUKSI / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG INDUKSI / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
					Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a							Daerah Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standar	%	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang terlayani sesuai standar	%	DINSOS P2PA
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Lembaga	DINSOS P2PA
2	08	07	201	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan	Perangka t Daerah	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / TANGGUNG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TANGGUNG	BIDANG TUGAS / TANGGUNG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
							Kabupaten/Kota											
2	08	07	201	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	DINSOS P2PA
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Layanan	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Layanan	DINSOS P2PA
2	08	07	202	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Dokumen	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / LINGKUP	BIDANG / TUGAS / INDUKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
						Kabupaten/ Ko ta	Kabupaten/ Kot a											
2	0 8	0 7	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dokume n	2	0 8	0 7	2.0 3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dokume n	DINSOS P2PA
2	0 8	0 7	203	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kot a	Laporan	2	0 8	0 7	2.0 3	000 7	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaran ya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kot a	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokume n	DINSOS P2PA

SEMULA									MENJADI									PD
URUSAN / TINGKAT	BIDANG INDUKSIAN / TINGKAT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / TINGKAT	BIDANG INDUKSIAN / TINGKAT	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOT A	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	
2	08	07	203	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	DINSOS P2PA